

## DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada.
- Basyir, Ahmad Azhar, 2000, Hukum Perkawinan Islam, UII Pres, Yogyakarta
- Fajar, Mukti, dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Fuady, Munir, 2015, Konsep Hukum Perdata, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- \_\_\_\_\_,2003, Hukum Perbankan Modern (Buku Kesatu), PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Fakultas Hukum Universitas Udayana 2013, Pedoman Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Udayana, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar.
- Hermansyah, 2005, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Kencana, Jakarta.
- Ikhwansyah, Isis, Sonny Dewi Judiasih, dan Rani Suryani Pustikasari, 2012, Hukum Kepailitan (Analisis Hukum Perselisihan dan Hukum Keluarga Serta Harta Benda Perkawinan), CV Keni Media, Bandung.
- Mahmud, Peter Marzuki, 2009, Penelitian Hukum Edisi I, Cetakan V, Kencana, Jakarta.
- Manan, Abdul, 2006, Aplikasi Asas Equalitas Hak dan Kedudukan Suami Istri Dalam Penjaminan Harta Bersama Pada Putusan Mahkamah Agung, CV, Mandar Maju, Bandung.
- Muhammad Djumhana. HukumPerbankandiIndonesia.(Bandung:PT. CitraAdityaBakti, 2000), 3-5.
- DjoniS.Gajali dan Rachma di Usman. Hukum Perbankan (Jakarta:Sinar Grafika,2010), hal 525
- Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar(Yogyakarta:Liberty,2002), hal 71.

Purwahid Patrik dan Kashadi, Hukum Jaminan, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang,2000,.hlm 52

H. Salim HS.Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia, PT.Raja Grafindo Persada. 2007,. hlm.100.

Rachmadi Usman,Pasal – Pasal Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah,Djambatan, Jakarta,.1999, hlm.44 .

Jurnal Ilmiah:

Indi Apriyani, Putu, Parsa, I Wayan, Akibat Hukum Kepailitan Suami/Istri Terhadap Harta Bersama Suami-Istri Tanpa Perjanjian Kawin, Kertha Semaya, Volume 03, Nomor 05, September 2015

Wijayanti, Winda, 2013, Kedudukan Istri Dalam Pembagian Harta Bersama Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Terkait Kerahasiaan Bank, Jurnal Konstitusi, Volume 10 Nomor 4, Desember 2013.

Peraturan Perundang – Undangan :

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang – Undang Nomor 5 tahun 1960 Tentang Pokok – Pokok Agraria.

Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974, Tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara 3019.

Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Undang – Undang nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan.

Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara 3790

Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 pasal 10 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 913 K/Sip/1982, tanggal 21 Mei 1983

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1020 K/Pdt/1986, tanggal 29 September 1987

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 dalam point III (Rumusan Kamar Agama) ayat (1d).

Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank;

Peraturan OJK No.1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan;

Peraturan OJK Nomor 9/POJK.03/2016 Tentang Prinsip Kehati – hatian Bagi Bank Umum Yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Pihak Lain;

Peraturan OJK Nomor 78/POJK.04/2017 Tentang Transaksi Efek Yang Tidak Dilarang Bagi Orang Dalam;